

EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI OBLIGASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEKTOR KONSTRUKSI

Mirwan Alkhatiri

Politeknik Keuangan Negara STAN

Amrie Firmansyah

Politeknik Keuangan Negara STAN

amrie.firmansyah@gmail.com

Abstract

This study aims to review the implementation of the bonds accounting policies, including the conformity of the recognition, measurement, presentation, and disclosure of the bond positions in Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) Number 50, 55 and 60 (revised 2014). This research method using quantitative descriptive approach. The sample used in this research uses State-Owned Enterprise (SOE) of construction sector by using financial statement data including the statement of financial position (balance sheet) and notes on the financial report during 5 years (2013-2017). This study concludes that from four SOEs used in this study, there are two SOEs that specify the basic accounting policy of bonds treatment, namely PT. Wijaya Karya and PT. Pembangunan Perumahan. Meanwhile, PT. Adhi Karya and PT Wijaya Karya do not specify what accounting or financial accounting policies which they refer to the accounting treatment of corporate bonds. Furthermore, the recognition and measurement of bonds applied by the SOEs of construction sector are in conformity with SFAS 55 (Revised) 2014. In addition, the disclosure of bonds related to additional information generally uses SFAS 60 (Revised 2014), but there is some information that has not been disclosed by companies include risks arising from the bond financial instrument that is the business risk.

Keywords: Bonds, Disclosures, Measurement, Presentation, Recognition.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas penerapan kebijakan akuntansi obligasi meliputi kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan posisi keuangan pos obligasi dalam kerangka Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 50, 55, dan 60 (revisi 2014). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi dengan menggunakan data laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan (neraca) dan catatan atas laporan keuangan selama 5 tahun (2013-2017). Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari empat BUMN yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat dua BUMN yang menyebutkan secara pasti dasar kebijakan akuntansi akuntansi obligasi, yaitu PT. Wijaya Karya dan PT. Pembangunan Perumahan. Sementara itu, PT. Adhi Karya dan PT Wijaya Karya tidak menyebutkan secara pasti kebijakan akuntansi atau SAK apa yang mereka jadikan dasar dan acuan untuk perlakuan akuntansi obligasi perusahaan. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran obligasi yang diterapkan oleh BUMN sektor konstruksi telah sesuai dengan PSAK 55 (Revisi) 2014. Selain itu, pengungkapan obligasi terkait dengan informasi tambahan secara umum telah menggunakan PSAK 60 (Revisi 2014), tetapi terdapat beberapa informasi yang belum diungkapkan oleh perusahaan diantaranya risiko yang timbul dari instrumen keuangan obligasi yaitu risiko usaha.

Kata Kunci : Obligasi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan.

I. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2017, Indonesia terus meningkatkan daya saing secara global dan regional di wilayah Asia Tenggara. Hal ini didasarkan pada data yang

dimiliki oleh *World Economic Forum Global Competitiveness Report*, bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dibawah tiga negara lain di Asia Tenggara yakni Singapura, Malaysia, dan Thailand (reports.weforum.org). Kemampuan suatu negara untuk bisa bersaing secara global salah satunya dinilai melalui kekuatan bidang infrastruktur yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan untuk menunjang kebijakan industri secara nasional, perdagangan, sistem logistik nasional, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Nilai infrastruktur Indonesia berada pada posisi kelima di wilayah Asia Tenggara dengan nilai infrastruktur sejak tahun 2009-2017 jauh di bawah Singapura, Filipina, Thailand, dan Malaysia. (reports.weforum.org). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan infrastruktur dan daya saing negara, sejak tahun 2009-2017 Indonesia menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam penyusunan anggaran.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan katadata semenjak tahun 2009-2017 alokasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur Indonesia terus mengalami peningkatan pada tahun 2009 besarnya alokasi pembangunan infrastruktur adalah Rp76,3 triliun, kemudian naik menjadi Rp86 triliun pada tahun 2010, pada tahun 2011 menjadi Rp114,2 triliun, tahun 2012 sebesar Rp145,5 triliun, tahun 2013 sebesar 184 triliun, tahun 2014 sebesar Rp178 triliun, tahun 2015 sebesar 290 triliun, tahun 2016 sebesar Rp317 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp400,9 triliun. (databoks.katadata.co.id/datapublish/2016). Peningkatan alokasi pembiayaan pembangunan yang paling signifikan terjadi sejak tahun 2013 sampai 2017. Peningkatan pembangunan infrastruktur tersebut sebagian besar dilakukan oleh beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang konstruksi. Infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN sektor konstruksi tersebut diantaranya adalah jalan, bandar udara, pelabuhan, jalur kereta api, telekomunikasi, irigasi, bendungan, perumahan, dan elektrifikasi listrik (katadata.co.id/infografik/2017). BUMN sektor konstruksi dalam melaksanakan proses pembangunan infrastruktur tersebut memperoleh pendanaan modal usaha yang tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga melalui pendanaan melalui pihak swasta atau pihak eksternal perusahaan. Secara umum pendanaan yang dilakukan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya berdasarkan pihak yang memberikan dan jangka waktunya terbagi menjadi pembiayaan dari dalam (intern) dan pembiayaan dari luar perusahaan (extern) serta pembiayaan jangka panjang (long term) dan pembiayaan jangka pendek (short term). Perusahaan umumnya memilih

pembiayaan yang berasal dari pihak luar dan bersifat jangka panjang dikarenakan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi, cakupan pembiayaan yang luas, dan tidak berpengaruh kepada kepemilikan perusahaan. Pembiayaan jangka panjang yang berasal dari pihak eksternal perusahaan contohnya adalah obligasi, saham biasa, saham preferen, dan modal ventura.

Sementara itu, berdasarkan data yang dimiliki oleh Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia) pada tahun 2017, BUMN hanya terpaut Rp5,6 triliun dari perusahaan non BUMN dalam penerbitan obligasi dalam pasar keuangan, yakni sebesar Rp26,1 triliun (ekbis.sindonews.com). Perusahaan konstruksi BUMN telah mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk mengelola dana investasi melalui obligasi untuk mendapatkan imbal hasil berupa bunga yang dibayarkan secara rutin melalui kegiatan produktif. Kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi selain membayar bunga secara berkala dan pokok obligasi pada waktu jatuh tempo adalah melaporkan jumlah obligasi yang beredar di pasar dan jumlah bunga yang harus dibayarkan. Laporan keuangan yang lengkap dan komprehensif memudahkan calon investor yang akan membeli obligasi perusahaan memperkirakan kemungkinan gagal bayar dan risiko jika membeli obligasi perusahaan yang bersangkutan.

Menurut PSAK Nomor 50, 55, dan 60 (revisi 2014) tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan instrumen keuangan disebutkan bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan asset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penerapan PSAK dengan pengungkapan informasi tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Penyajian Laporan Keuangan yang wajar tidak hanya menampilkan perhitungan secara tepat tetapi juga klasifikasi, pengakuan hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan dalam menerbitkan obligasi.

Penelitian-penelitian terkait dengan obligasi perusahaan dilakukan dengan mengujinya sebagai variabel independen maupun variabel independen dalam uji pengaruh. Informasi yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut adalah

peringkat obligasi sebagaimana penelitian Andriyani dan Darmawati (2016), Henny (2016), Lestari dan Yasa (2016), umur obligasi sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Kustiyaningrum et al. (2016) dan nilai buku obligasi sebagaimana penelitian Jaluanto dan Nafi'ah (2016). Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut karena bertujuan untuk mengulas penerapan kebijakan akuntansi obligasi meliputi kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan posisi keuangan pos obligasi.

Penelitian ini mengambil objek BUMN sektor konstruksi yang terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, dan PT Pembangunan Perumahan karena dalam proses pembangunan infrastruktur selama ini perusahaan-perusahaan tersebut dinilai memiliki pengaruh dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dan menjadi *pioneer* perusahaan konstruksi di Indonesia. Keempat BUMN sektor konstruksi tersebut juga menjadi perusahaan yang aktif dalam melakukan pencarian pendanaan melalui penerbitan obligasi. Dalam kurun waktu 2013-2017, BUMN sektor konstruksi secara aktif sebesar 14,0% dari 33,4% jumlah penerbitan obligasi di pasar modal (pefindo.com/index). Dengan demikian, diharapkan pihak - pihak yang berkepentingan seperti investor dan lembaga pemeringkat obligasi dapat mengetahui informasi obligasi secara lebih rinci dan melakukan penilaian risiko secara lebih tepat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut konvensi yang berlaku di Indonesia, surat utang dengan tenor di atas 5 tahun disebut dengan obligasi, meskipun beberapa surat utang bertenor 3 tahun yang diterbitkan perusahaan pembiayaan dipasarkan dan dicatat sebagai obligasi. (Moechdie dan Ramelan, 2012). Sementara itu, menurut Bodie, Kane, dan Marcus (2006), obligasi sering disebut sebagai *fixed-income securities*, karena obligasi menawarkan aliran pendapatan kas yang tetap atau aliran pendapatan kas dengan formula yang sudah ditentukan sebelumnya. Obligasi relatif mudah dimengerti karena besarnya pembayaran sudah ditentukan dari awal dan risiko yang ditanggung dapat menjadi relatif kecil selama penerbit obligasi dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar hutangnya

Obligasi adalah surat tanda bukti utang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegangnya dengan imbalan bunga sejumlah tertentu. Perusahaan yang menerbitkan obligasi biasanya disebabkan oleh kebutuhan dana dalam jumlah besar yang tidak bisa dipenuhi dari akumulasi laba ditahan maupun dari utang bank. Obligasi memiliki masa

jatuh tempo yang lebih dari satu tahun (biasanya antara 5 sampai dengan 20 tahun), oleh karena itu apabila perusahaan menerbitkan obligasi akan menimbulkan utang obligasi. Utang ini dikelompokkan ke dalam utang jangka panjang. (Kieso et al., 2014)

Menurut Surya dan Nasher (2011) menyatakan bahwa tujuan penting yang melatarbelakangi perusahaan dalam menerbitkan obligasi diantaranya adalah jumlah dana yang dibutuhkan akan lebih fleksibel nilainya sesuai dengan kemampuan pasar dalam menyerap kebutuhan obligasi tersebut, serta kemampuan pihak penjamin emisi dalam memberikan komitmen jumlah penerbitan obligasi. Utang obligasi akan dibayarkan pada masa yang telah ditentukan. Atas pinjaman tersebut investor diberi imbalan berupa bunga sebagai salah satu instrumen yang dikenal di pasar modal. Sebagai salah satu instrumen pasar modal, penerbitan obligasi lebih menguntungkan dibandingkan dengan pinjaman bank, karena beban bunga yang ditanggung emiten lebih kecil dan dapat dibayar secara berkala, akan tetapi instrumen obligasi ini akan dapat merugikan jika investor kurang mengerti dan tidak memperhatikan informasi tentang obligasi yang diinvestasikannya.

Menurut Syahyunan (2013), dalam penerbitan obligasi memiliki manfaat atau keuntungan antara lain dapat memperoleh pendanaan yang lebih besar dan diterima dalam waktu bersamaan atau sekaligus (tidak bertahap atau melewati termin-termin), biaya penerbitan obligasi lebih murah dibandingkan dengan penerbitan saham baru, proses penerbitan obligasi lebih murah dan cepat dibandingkan dengan penerbitan saham baru dan mampu meningkatkan produktivitas dan profesionalisme pengelolaan perusahaan, karena tuntutan untuk menyajikan keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain memiliki manfaat atau keuntungan, obligasi juga memiliki kelamahan dan akan menjadi risiko dalam obligasi yang akan ditanggung oleh investor (pembeli obligasi) itu sendiri. Menurut Syahyunan (2013), berikut adalah beberapa kelemahan obligasi antara lain kemungkinan terjadinya gagal bayar (*default*) karena perusahaan memiliki masalah yang berhubungan dengan kemampuan membayar kewajibannya atau likuiditas. ataupun perusahaan penerbit obligasi (*issuer*) mengalami kebangkrutan maka perusahaan tidak akan mampu menepati janjinya.

Ada beberapa karakteristik yang melekat pada obligasi menurut Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id/produk/surat-utang-obligasi/>) :

1. Nilai nominal (*face value*) yang terkandung dalam obligasi merupakan nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi saat waktunya nanti obligasi telah masuk jatuh tempo (*maturity*).
2. Bunga kupon (*coupon rate*) merupakan tingkat bunga yang akan diterima oleh pemegang obligasi (*investor*) secara periodik atau berkala saat waktu pembayaran bunga sesuai kesepakatan atau kontrak dilakukan.
3. Waktu jatuh tempo (*maturity*) adalah tanggal dimana penerbit obligasi (*issuer*) memiliki kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman obligasi kepada pemegang obligasi (*investor*).
4. Penerbit obligasi/emiten (*issuer*), menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap dilakukannya pembelian obligasi atau tidak oleh seorang investor. Dengan mengetahui penerbit obligasi (*issuer*) investor dapat melihat rekam jejak, serta memetakan risiko jika dilakukan pembelian obligasi.

Di dalam menerapkan akuntansi obligasi, terdapat tiga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia berdasarkan ketentuan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu PSAK 50 (Revisi 2014) tentang, Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55 (Revisi 2014) tentang, Instrumen Keuangan: Pengukuran, dan PSAK 60 (Revisi 2014) tentang, Instrumen Keuangan: Pengungkapan. PSAK 50 (Revisi 2014) merupakan hasil adopsi dari IAS 32 yaitu *Financial Statement: Presentation*, serta mengalami perubahan menyeluruh mengenai instrumen keuangan yang sebelumnya hanya mengatur investasi efek tertentu, dan tidak mengatur instrumen keuangan bentuk yang lain (PSAK 50 Revisi 2006). PSAK 50 ini berfungsi untuk melengkapi prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan didalam PSAK 55 serta Pengungkapan informasi didalam PSAK 60. Sementara itu, PSAK 55 tentang instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran merupakan adopsi dari IAS 39 *Financial Instrument: Recognition and Measurement*.

Obligasi menurut PSAK 55 diakui dan diukur diukur pada pengakuan awal sebesar nilai wajar yang ditambah dengan biaya transaksi kecuali untuk instrumen yang diukur dengan menggunakan nilai wajar. Harga pasar atau nilai wajar atas liabilitas yang akan diterbitkan adalah sebesar harga penawaran (*bid price*). Definisi nilai wajar untuk pengukuran liabilitas keuangan adalah sebesar harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

PSAK 60 tentang pengungkapan dalam laporan keuangan terhadap instrumen keuangan merupakan adopsi dari IFRS 7 versi Maret 2009. Pengungkapan dalam laporan

keuangan yang diperlukan terkait obligasi menurut PSAK 60 (2014) yang pertama adalah kewajiban untuk mengungkapkan metode dan asumsi yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar setiap kelompok aset atau liabilitas keuangan. Kedua, pengungkapan secara nilai wajar tidak disyaratkan apabila unsur kontrak yang mengandung fitur partisipatif tidak mengikat. Ketiga, entitas wajib mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan. Keempat, pengungkapan lain yang harus ada adalah kebijakan akuntansi, dan nilai wajar dari setiap aset dan liabilitas keuangan dengan cara yang memungkinkan untuk membandingkan dengan jumlah tercatatnya. Dengan menggunakan hierarki tingkatan nilai wajar sebagai berikut:

Tabel 1 Hierarki Tingkatan Nilai Wajar

Tingkatan	Keterangan
Tingkat 1	harga kuotasian (belum disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
Tingkat 2	input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai harga) atau secara tidak langsung (yaitu diperoleh dari harga);
Tingkat 3	input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data dan informasi laporan keuangan baik laporan posisi keuangan (neraca) maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendapatkan data yang objektif dalam mengetahui pencatatan dan penilaian persediaan perusahaan dengan PSAK No. 50, 55, 60.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data angka maupun informasi deskriptif dalam laporan keuangan, laporan tahunan maupun situs perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder karena data yang diperoleh dari perusahaan sudah diolah dan terdokumentasi. Data yang digunakan adalah dengan menggunakan data dan informasi tahun 2013 s.d. 2017

IV. PEMBAHASAN

1. IV.1. Kebijakan Akuntansi Obligasi BUMN Sektor Konstruksi

Perusahaan umumnya menerbitkan obligasi dengan tujuan untuk mendapatkan pendanaan tambahan, tanpa mempengaruhi persentase kepemilikan perusahaan. Ketika menerbitkan obligasi, maka pihak perusahaan (*issuer*) memiliki kewajiban di masa depan kepada investor yang memegang obligasi perusahaan sesuai dengan kontrak perjanjian. Kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk membayarkan bunga sebagai pendapatan investor secara berkala atau periodik, dan juga membayarkan pokok pada saat jatuh tempo. Di dalam proses pencatatan, hingga pelaporan keuangan perusahaan terkait dengan obligasi terdapat kebijakan perusahaan yang diambil, berikut tinjauan terkait kebijakan akuntansi obligasi BUMN sektor konstruksi.

a. PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk.

Pada tahun 2013, kebijakan akuntansi yang diambil oleh PT. Wijaya Karya dan konsolidasiannya terkait dengan obligasi sebagai instrumen adalah mengacu kepada PSAK Nomor 55 (Revisi 2006) yang mengatur tentang Instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK Nomor 50 (Revisi 2010) yang mengatur tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK Nomor 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Sementara kebijakan akuntansi PT. Wijaya Karya dan konsolidasiannya, pada tahun 2014 terkait dengan obligasi instrumen keuangan, tetap sama pada tahun 2013 dengan sedikit mengalami pembaharuan, yaitu: PSAK Nomor 55 (Revisi 2011), yang sebelumnya pada 2013 diterapkan PSAK Nomor 55 (Revisi 2006). Perbedaan antara PSAK 55 (Revisi 2011) dengan PSAK 55 (Revisi 2006) disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Perbedaan PSAK 55 (Revisi 2011) dengan PSAK 55 (Revisi 2006)

Perihal	PSAK 55 (Revisi 2011)	PSAK 55 (Revisi 2006)
Ruang Lingkup	Pengecualian untuk puttable	Tidak ada
	Tidak ada	Pengecualian untuk kontrak
	Tidak ada	Pengecualian untuk investasi
Definisi	Kontrak penjamin keuangan.	Tidak ada
Reklasifikasi	Reklasifikasi dari diukur pada	Tidak ada
	Reklasifikasi dari tersedia untuk	Tidak ada

Pada tahun 2015, kebijakan akuntansi yang diambil oleh perusahaan, terkait dengan instrumen keuangan obligasi secara umum tetap sama. Tetapi terdapat pembaharuan yaitu PSAK Nomor 55 (Revisi 2014) yang sebelumnya pada tahun 2014 diterapkan PSAK Nomor 55 (Revisi 2011). PSAK Nomor 50 (Revisi 2014) yang sebelumnya pada tahun 2014 diterapkan PSAK Nomor 50 (Revisi 2010) tentang penyajian laporan keuangan sebagai acuannya. Pada tahun 2016 dan tahun 2017, kebijakan akuntansi perusahaan terkait instrumen keuangan obligasi tidak terdapat perubahan sebagai acuannya, yaitu tetap mengacu kepada PSAK Nomor 50 (Revisi 2014), PSAK Nomor 55 (Revisi 2014), dan PSAK Nomor 60 (revisi 2014).

b. PT. Waskita Karya (Persero), Tbk.

Pada tahun 2013 dan tahun 2014, PT Waskita Karya tidak menyebutkan secara jelas, berdasarkan PSAK atau dengan standar apa perusahaan menentukan kebijakan akuntansinya terkait obligasi, tetapi perusahaan menyebutkan dasar pengukuran untuk pelaporan obligasi di dalam Laporan Posisi Keuangan terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi dan berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi. Dan juga mengenai biaya emisi untuk penerbitan obligasi yang terkait dengan penentuan hasil emisi bersih obligasi.

Pada 2015 perusahaan menambahkan kebijakan terkait dengan pengukuran obligasi yang termasuk liabilitas keuangan, yakni liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan, diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada 2016 dan 2017, kebijakan akuntansi yang diambil oleh PT. Waskita Karya secara umum sama dengan tahun 2015, tetapi terdapat tambahan terkait dengan liabilitas keuangan yaitu penghentian liabilitas keuangan jika terjadi, reklasifikasi liabilitas keuangan dan juga saling hapus liabilitas keuangan.

c. PT. Adhi Karya (Persero), Tbk.

Secara umum pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 kebijakan akuntansi obligasi yang diambil oleh PT. Adhi Karya mengacu kepada PSAK 50, 55, dan 60 dengan menerapkan bagian pengukuran keuangan yang diamortisasi, penerapan metode suku bunga efektif, dan penerapan reklasifikasi dan penghentian liabilitas keuangan baru mulai diterapkan oleh perusahaan pada tahun 2016 dan tahun 2017.

d. PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.

Pada tahun 2013 dan 2014, kebijakan akuntansi yang diambil oleh PT. Pembangunan Perumahan mengenai obligasi diatur dengan mengacu kepada penerapan PSAK 50 (Revisi 2010), PSAK 55 (Revisi 2006), dan PSAK 60, tetapi tanpa ada penjelasan tambahan yang menjelaskan kebijakan yang diambil oleh perusahaan seperti penggunaan nilai amortisasi dan nilai wajar oleh perusahaan. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, perusahaan mulai menerapkan secara penuh pembaharuan terhadap PSAK, yaitu menjadi mengacu kepada PSAK 50 (Revisi 2014), PSAK 55 (Revisi 2014), dan PSAK 60.

4.1. Penyajian Obligasi BUMN Sektor Konstruksi

a. PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk

Terkait dengan penyajian obligasi berdasarkan PSAK 50 (Revisi 2014) PT. Wijaya Karya mengklasifikasikan instrumen keuangan obligasi pada bagian kewajiban jangka panjang dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) untuk pokok obligasi maupun bunga obligasi, apabila waktu jatuh tempo masih lebih dari 1 tahun. Apabila waktu jatuh tempo kurang dari satu tahun maka akan dilakukan reklasifikasi di dalam Laporan Posisi Keuangan menjadi kewajiban jangka pendek.

b. PT. Waskita Karya (Persero), Tbk

Terkait dengan penyajian obligasi menurut PSAK 50 (Revisi 2014) PT. Waskita Karya juga mengklasifikasikan instrumen keuangan obligasi pada bagian kewajiban jangka panjang dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) untuk pokok obligasi maupun bunga obligasi, apabila waktu jatuh tempo masih lebih dari 1 tahun. Apabila waktu jatuh tempo kurang dari satu tahun maka akan dilakukan reklasifikasi di dalam Laporan Posisi Keuangan menjadi kewajiban jangka pendek. Kemudian pelaporan yang dibuat dalam Laporan Posisi Keuangan adalah berdasarkan nilai wajar instrumen keuangan.

c. PT. Adhi Karya (Persero), Tbk

Terkait dengan penyajian obligasi berdasarkan PSAK 50 (Revisi 2014) PT. Adhi Karya mengklasifikasikan instrumen keuangan obligasi pada bagian kewajiban jangka panjang dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) untuk pokok obligasi maupun bunga obligasi, apabila waktu jatuh tempo masih lebih dari 1 tahun. Apabila waktu jatuh tempo kurang

dari satu tahun maka akan dilakukan reklasifikasi di dalam Laporan Posisi Keuangan menjadi kewajiban jangka pendek.

d. PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk

Terkait dengan penyajian obligasi berdasarkan PSAK 50 (Revisi 2014) PT. Pembangunan Perumahan mengklasifikasikan instrumen keuangan obligasi pada bagian kewajiban jangka panjang dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) untuk pokok obligasi maupun bunga obligasi, apabila waktu jatuh tempo masih lebih dari 1 tahun. Apabila waktu jatuh tempo kurang dari satu tahun maka akan dilakukan reklasifikasi di dalam Laporan Posisi Keuangan menjadi kewajiban jangka pendek.

2. IV.2. Pengakuan dan Pengukuran Obligasi BUMN sektor Konstruksi

Pengakuan dan pengukuran terkait dengan obligasi diatur di dalam PSAK 55 (Revisi 2014) terkait dengan hal tersebut BUMN sektor konstruksi menerapkan sebagai berikut:

a. PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk

Untuk pengukuran obligasi instrumen keuangan dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi, karena manajemen beranggapan bahwa nilai tercatat liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi kemudian diakui dalam Laporan Posisi Keuangan mendekati nilai wajarnya karena memiliki tingkat bunga pasar. Pengukuran nilai wajar PT. Wijaya Karya mengikuti dasar PSAK 55 (Revisi 2014) yaitu dengan membagi ke dalam 3 level yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 Pengukuran nilai wajar obligasi PT Wijaya Karya

Tingkatan	Keterangan
Tingkat 1	harga kuotasian (belum disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
Tingkat 2	input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai harga) atau secara tidak langsung (yaitu diperoleh dari harga); dan
Tingkat 3	input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

b. PT. Waskita Karya (Persero), Tbk

Pengakuan dan pengukuran liabilitas keuangan PT. Waskita Karya adalah jika dan hanya jika PT. Waskita dan konsolidasian menjadi salah satu pihak dalam kontrak instrumen yang bersangkutan. pada proses penerbitan obligasi, karena PT. Waskita adalah sebagai penerbit (*issuer*), maka wajib mengakuinya sebagai liabilitas keuangan. Pada pengukuran iabilitas keuangan awalnya PT. Waskita Karya menilainya pada nilai wajar. Apabila tidak melauai pengukuran nilai wajar maka nilai wajar ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi (biaya emisi obligasi) yang diatribusikan secara langsung dengan perolehan penerbitan liabilitas keuangan. Kemudian pada tahun selanjutnya perusahaan mengukur nilai dari liabilitas keuangan dikurang atau ditambahn dengan biaya amortisasi yang dihitung dengan metode suku bunga efektif.

c. PT. Adhi Karya (Persero), Tbk

Pengukuran nilai wajar liabilitas keuangan PT. Adhi Karya sedapat mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, PT. Adhi Karya menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Pengukuran nilai wajar PT. Wijaya Karya mengikuti dasar PSAK 55 (Revisi 2014) yaitu dengan membagi ke dalam 3 level. Proses pengakuan dan pengukuran liabilitas PT. Adhi Karya telah sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2014) yaitu instrumen keuangan diukur pada pengakuan awal sebesar nilai wajar yang ditambah dengan biaya transaksi kecuali untuk instrumen yang diukur dengan menggunakan nilai wajar. Harga pasar atau nilai wajar atas liabilitas yang akan diterbitkan adalah sebesar harga penawaran (*bid price*). PT. Adhi Karya juga membagi liabilitas keuangan mereka ke dalam 3 level sesuai dengan PSAK 55, yaitu sebagai berikut.

Tabel 4 Pengukuran nilai wajar obligasi PT Adhi Karya

Tingkatan	Keterangan
Tingkat 1	harga kuotasian (belum disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
Tingkat 2	input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai harga) atau secara tidak langsung (yaitu diperoleh dari
Tingkat 3	input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

d. PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk

Pengukuran obligasi dalam laporan keuangan konsolidasian pada PT. Pembangunan Perumahan adalah sebesar biaya perolehan dari obligasi diamortisasi dianggap mendekati nilai wajarnya karena memakai bunga pasar yang berlaku. Hal ini telah sesuai dengan yang berlaku pada PSAK 55 (Revisi 2014) dimana jumlah pengakuan awal obligasi kemudian dikurang atau ditambah dengan akumulasi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode *effective interest rate* kemudian dikurangi dengan pengurangan pelunasan secara berkala dan indikasi apabila terjadi penurunan nilai untuk obligasi instrumen keuangan.

3. IV.3. Pengungkapan Obligasi BUMN Sektor Konstruksi

a. PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk.

Selama tahun 2013 sampai dengan 2017 pengungkapan yang dilakukan oleh PT. Wijaya Karya terkait obligasi instrumen keuangan secara umum berpedoman kepada standar yang berlaku yaitu PSAK 60 (revisi 2014) Terutama terkait dengan risiko keuangan yang menjadi perhatian perusahaan, hal ini dapat dilihat dengan adanya manajemen risiko keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yang diungkapkan dalam empat risiko utama, yaitu:

1. Risiko suku bunga, dimana perusahaan meminimalkan risiko tersebut dengan cara mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel.
2. Risiko Nilai tukar yang berkaitan dengan risiko pasar dan sensitivitas instrumen keuangan obligasi dilakukan mitigasi dengan cara melakukan kebijakan perencanaan keuangan yakni pengelolaan penerimaan dalam mata uang asing sesuai dengan kebutuhan investasi dan operasional;
3. Risiko Kredit adalah kemungkinan gagal yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya terkait obligasi. Mitigasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi risiko kredit adalah dengan memantau pendapatan, hubungan dengan pelanggan dan manajemen piutang agar tetap sehat;

4. Risiko likuiditas hampir sama dengan risiko kredit tetapi bersifat jangka pendek. Perusahaan mitigasi terkait dengan risiko ini adalah dengan cara memantau arus kas, dan jatuh tempo liabilitas keuangan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang.

Pengungkapan risiko atas pasar dan risiko likuiditas telah sesuai, tetapi di dalam pengungkapan risiko kredit belum diungkapkan terkait dengan jaminan aset atas liabilitas keuangan yang diterbitkan perusahaan yaitu obligasi apabila terdapat kemungkinan *default* di masa depan. Selain itu, belum terdapat pengungkapan risiko lain yang dapat mempengaruhi keuangan dan instrumen liabilitas yang diterbitkan perusahaan yaitu risiko usaha. Karena obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan adalah untuk mendanai proyek dan kegiatan operasional produktif perusahaan, maka obligasi sebagai pendanaan eksternal masuk ke dalam pengelolaan modal oleh perusahaan. Dengan cara mempertahankan kelangsungan usaha (*going concern*), memaksimalkan manfaat bagi pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan.

Selama tahun 2013 sampai dengan 2016 dalam pengungkapan risiko terkait liabilitas instrumen keuangan, PT. Wijaya Karya belum mengaitkan masing-masing risiko tersebut dengan analisis sensitivitas terkait sensitivitas pasar. Tetapi pada tahun 2017 risiko-risiko tersebut terutama untuk risiko tingkat suku bunga dan nilai tukar yang terkait dengan *coverage* perusahaan mulai dianalisis dengan sensitivitas pasar sehingga dapat dipahami lebih mudah oleh pembaca laporan keuangan terkait obligasi.

b. PT. Waskita Karya (Persero), Tbk.

Secara umum pada tahun 2013 sampai dengan 2017 PT. Waskita Karya mengungkapkan informasi sesuai dengan PSAK 60 dengan mengungkapkan risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan terutama yang berkaitan dengan liabilitas keuangan. Risiko yang diungkapkan oleh PT Waskita adalah sebagai berikut:

1. Risiko kredit, perusahaan berfokus pada bagian dimana kemungkinan akan adanya kegagalan bayar (*default*) pihak ketiga dalam kewajibannya kepada PT. Waskita Karya, sehingga akan mengurangi kemungkinan arus kas PT. Waskita Karya untuk membayar kewajiban kepada investor terkait liabilitas keuangan mereka. Mitigasi yang dilakukan perusahaan yaitu hanya memilih bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik. Tetapi perusahaan tidak mengungkapkan secara lebih terperinci

- mengenai asumsi dan alat ukur apa untuk menentukan suatu bank atau lembaga keuangan berpredikat baik.
2. Risiko suku bunga, perusahaan mengungkapkan mengenai asumsi yang digunakan penentuan risiko bunga, tetapi tidak mengungkapkan metode perhitungan untuk menentukan nilai dari risiko suku bunga secara kuantitatif.
 3. Risiko likuiditas, perusahaan telah mengungkapkan perhitungan mengenai likuiditas perusahaan sesuai dengan jatuh tempo yang akan terjadi sehingga dapat melakukan mitigasi dengan menjaga stabilitas arus kas agar PT. Waskita Karya dapat memenuhi kewajiban kontraktual liabilitas keuangannya.
 4. Risiko nilai tukar mata uang asing, menurut PT. Wijaya Karya tidak berpengaruh terlalu signifikan terhadap perusahaan, tetapi perusahaan tidak mengungkapkan alasan dan asumsi dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan.
 5. Perusahaan juga memperhitungkan risiko yang berkaitan dengan kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah sebagai *stakeholder* utama perusahaan, kondisi ekonomi dan sosial yang akan berdampak terhadap kinerja pendapatan perusahaan juga diungkapkan.

Dalam menjaga dan manajemen risiko terkait liabilitas instrumen keuangan, PT. Waskita Karya berusaha untuk menjaga rasio antara utang (instrumen liabilitas keuangan) yang dimiliki dengan ekuitas bersih perusahaan untuk modal kegiatan operasional sehingga perusahaan tetap bisa memitigasi risiko yang ada.

c. PT. Adhi Karya (Persero), Tbk.

Selama tahun 2013 sampai dengan 2017 pengungkapan yang dilakukan oleh PT. Adhi Karya terkait obligasi instrumen keuangan secara umum berpedoman kepada standar yang berlaku yaitu PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Terutama terkait dengan risiko keuangan yang menjadi perhatian perusahaan, hal ini dapat dilihat dengan adanya manajemen risiko keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yang diungkapkan dalam beberapa risiko utama, yaitu risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang asing, perusahaan juga memperhitungkan risiko yang berkaitan dengan kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah sebagai *stakeholder* utama

perusahaan, kondisi ekonomi dan sosial yang akan berdampak terhadap kinerja pendapatan perusahaan juga diungkapkan serta risiko terkait dengan nilai wajar.

Semua risiko tersebut telah diungkapkan di dalam CaLK perusahaan tetapi terdapat beberapa risiko yang tidak diungkapkan secara terperinci.

1. Risiko kredit, dimana perusahaan tidak mendeskripsikan mengenai agunan yang digunakan sebagai jaminan apabila perusahaan gagal untuk memenuhi kewajiban liabilitasnya di masa depan.
2. Pada bagian risiko kredit perusahaan tidak mengungkapkan alasan, estimasi, dan tolok ukur perusahaan mengelompokkan bank atau lembaga keuangan dengan predikat baik sehingga meminimalisasi risiko kredit perusahaan.
3. Pada risiko tingkat suku bunga, PT. Adhi Karya tidak mengungkapkan metode dalam menghitung risiko kuantitatif terkait dengan risiko tingkat suku bunga yang berubah.
4. PT. Adhi Karya tidak mengungkapkan alasan dan tolok ukur yang mengungkapkan kenapa risiko nilai mata uang asing tidak berpengaruh secara signifikan pada perusahaan.

Berkenaan manajemen risiko liabilitas instrumen keuangan, PT. Adhi Karya juga berusaha untuk menjaga rasio keuangan antara modal yang dimiliki dengan liabilitas (instrumen liabilitas keuangan) perusahaan untuk modal kegiatan operasional sehingga perusahaan tetap bisa memitigasi risiko yang ada. Pengungkapan risiko terkait liabilitas instrumen keuangan selama tahun 2013 sampai 2017, PT. Adhi Karya belum mengaitkan masing-masing risiko tersebut dengan analisis sensitivitas terkait sensitivitas pasar. Terutama untuk risiko tingkat suku bunga dan nilai tukar seharusnya perusahaan mulai mengaitkan analisis risiko dengan sensitivitas pasar sehingga dapat dipahami lebih mudah oleh pembaca laporan keuangan terkait obligasi.

d. PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.

Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, PT. PP telah mengungkapkan beberapa risiko yang menjadi perhatian perusahaan terkait dengan obligasi instrumen keuangan sesuai dengan pengungkapan minimal yang disyaratkan oleh PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Risiko-risiko tersebut antara lain risiko atas nilai tukar mata uang asing, risiko tingkat suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kesemua risiko tersebut telah diungkapkan, tetapi terdapat beberapa risiko yang belum sesuai dengan

PSAK 60 karena belum mengungkapkan informasi secara lengkap yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan, antara lain:

1. Risiko nilai tukar mata uang asing, terdapat informasi mengenai metode perhitungan yang belum diungkapkan dalam analisis yaitu terkait dengan sensitivitas pasar yang berpengaruh kepada risiko nilai tukar terhadap mata uang asing perusahaan.
2. Pada bagian risiko kredit, PT. PP tidak mengungkapkan informasi terkait peristiwa indikasi gagal bayar dalam liabilitas keuangan maka aset apa yang dijamin oleh PT. PP untuk investor belum diungkapkan. Kemudian mitigasi yang dilakukan untuk menghindari risiko di masa mendatang belum diungkapkan oleh perusahaan seperti penilaian terhadap bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga, dan pemilihan jatuh tempo kewajiban yang harus dilunasi perusahaan dalam jangka pendek.
3. PT. PP juga tidak mengungkapkan beberapa risiko lain yang disyaratkan oleh PSAK 60 yang bisa membantu pengguna laporan keuangan dalam mendapatkan informasi tambahan yaitu mengenai risiko usaha, diantaranya terkait dengan kendali pemerintah atas perusahaan, perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik serta penetapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yang akan mempengaruhi arus kas dan berdampak terhadap risiko lain.

V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan kebijakan akuntansinya hanya ada dua perusahaan yang menyebutkan secara pasti dasar kebijakan akuntansi apa yang mereka ambil sebagai acuan untuk dasar perlakuan akuntansi obligasi, yaitu PT. Wijaya Karya dan PT. Pembangunan Perumahan. Sementara untuk PT. Adhi Karya dan PT. Wijaya Karya, tidak menyebutkan secara pasti kebijakan akuntansi atau SAK apa yang mereka jadikan dasar dan acuan untuk perlakuan akuntansi obligasi perusahaan. Walaupun tidak disebutkan secara langsung, BUMN sektor konstruksi tetap mengacu kepada PSAK untuk akuntansi obligasi, yaitu PSAK 50 (Revisi 2014) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55 (Revisi 2014) tentang Instrumen Keuangan: Pengukuran, dan PSAK 60 (Revisi 2014) tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Ketiga PSAK yang menjadi acuan dalam kebijakan akuntansi perlakuan obligasi periode 2013-2017 beberapa kali mengalami pembaharuan dan ketiga perusahaan tersebut juga mengikuti dengan memperbaharui kebijakan akuntansinya.

Secara umum penyajian obligasi dalam Laporan Posisi Keuangan BUMN sektor konstruksi sesuai dengan PSAK 50 (Revisi 2014) yakni sesuai dengan perjanjian dan substansi kontraktual antara pemegang obligasi dengan perusahaan penerbit obligasi, sehingga perusahaan penerbit menyajikan obligasi sebagai liabilitas yang akan dipenuhi di masa depan dan menyajikannya sebesar nilai wajar. Pengakuan dan pengukuran obligasi yang diterapkan, telah sesuai dengan PSAK 55 (Revisi) 2014 yaitu dengan cara mengukur sebesar nilai wajar yang berlaku, apabila tidak dapat dilakukan pengukuran nilai wajar secara andal maka BUMN sektor konstruksi mengukurnya sebesar nilai perolehan ditambah dengan nilai emisi atau biaya penerbitan obligasi, kemudian disesuaikan dengan nilai amortisasi obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan..

Pengungkapan obligasi terkait dengan informasi tambahan secara umum telah menggunakan PSAK 60 (Revisi 2014), tetapi terdapat beberapa informasi yang belum diungkapkan oleh perusahaan diantaranya adalah yang terkait dengan risiko yang timbul dari instrumen keuangan obligasi yang belum diungkapkan yaitu risiko usaha. Risiko usaha penting untuk diungkapkan oleh perusahaan, karena sebagai BUMN sektor konstruksi dan rekanan pemerintah di dalam pembangunan infrastruktur. Risiko usaha tersebut diantaranya terkait dengan kendali pemerintah atas perusahaan (*dominan*), perubahan kebijakan pemerintah dalam pembangunan, kondisi ekonomi dan sosial politik yang terjadi, serta penetapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yang akan mempengaruhi arus kas dan berdampak pada risiko lain yang telah diungkapkan. Selain itu belum tersedianya pengungkapan kualitatif yang bersifat kuantitatif oleh perusahaan, yakni hubungan keseluruhan sifat dan cakupan risiko. Sehingga setiap risiko berdiri sendiri tanpa saling mempengaruhi, yang sebenarnya risiko itu saling mempengaruhi dan bila dapat ditemukan risiko yang memiliki pengaruh paling besar maka risiko tersebut dapat menjadi *concern* dari manajemen untuk melakukan mitigasi sejak awal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini untuk dapat dilihat nilai wajar yang dimiliki oleh setiap obligasi sulit untuk didapatkan, karena lembaga pemeringkat seperti Pefindo, IBPA (*Indonesian Bond Pricing Agency*), dan Bursa Efek Indonesia, tidak merilis secara berkala nilai wajar yang dimiliki oleh setiap obligasi yang beredar di dalam pasar modal. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek yang

lebih mudah didapat ataupun objek yang lebih besar sehingga dapat mengulas penerapan akuntansi untuk obligasi di Indonesia secara lebih komprehensif.

Sebaiknya BUMN sektor konstruksi mengungkapkan mitigasi risiko yang berkaitan agar investor lebih percaya bahwa setiap risiko yang ada telah diminimalisasi sehingga tidak menimbulkan efek yang berdampak besar. Perusahaan sebaiknya mengungkapkan informasi yang bersifat kualitatif bukan hanya kuantitatif, yakni seperti adanya gejolak ekonomi terhadap pembayaran kewajiban, peristiwa sosial politik yang mengindikasikan kebutuhan masyarakat terhadap obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat membantu dalam proses keterbukaan informasi obligasi yang ada di pasar modal. Setelah proses pendaftaran obligasi yang diterbitkan perusahaan selesai, OJK dapat menyebarkan informasi terkait obligasi yang dapat dibeli sehingga masyarakat memiliki kesempatan berinvestasi dan dapat membandingkan dengan laporan keuangan perusahaan terkait dengan obligasi yang masih *outstanding* di pasar modal. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebaiknya mengatur standar mengenai bagaimana perusahaan melaporkan keterkaitan dan hubungan kuantitatif masing-masing risiko yang ada, dan penerapan standar mengenai bagaimana sebenarnya risiko itu saling mempengaruhi dan bila dapat ditemukan risiko yang memiliki pengaruh paling besar maka risiko tersebut dapat menjadi *concern* dari manajemen untuk melakukan mitigasi sejak awal dan *early warning* investor sebelum membeli obligasi perusahaan. Investor yang akan membeli obligasi perusahaan, memperhatikan tujuan penerbitan obligasi oleh perusahaan, yakni untuk perluasan usaha (ekspansi) atau tidak agar dapat menghasilkan investasi yang produktif. Hubungan risiko yang dimiliki oleh perusahaan agar di analisis lebih lanjut, serta dikaitkan dengan kondisi pasar saat ini dan masa mendatang agar tujuan investasi melalui obligasi dapat memperoleh imbal hasil (*return*) sesuai perencanaan awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, C., Darmawati, D. (2016). Pengaruh manajemen laba, jaminan dan umur obligasi terhadap peringkat obligasi. Seminar Nasional Cendekiawan: 4.1.-4.13
- Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. (2013). *Manajemen Portfolio dan Investasi (Edisi Global)1, Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat

- Darmadji, Tjiptono dan M. Fakhruddin. 2001. *Pasar Modal Indonesia : Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat
- Henny (2016). Pengaruh faktor akuntansi terhadap prediksi peringkat obligasi. *Jurnal Akuntansi*, XX(1): 52-69
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*
- Jaluanto, Nafi'ah, F. (2016). Penerbitan obligasi dan investasi aktiva tetap pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2013. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 5(2): 69-82
- Kieso, D.E., Weygant, J.J., Warfield, T.D. (2014). *Intermediate Accounting: IFRS Edition 2nd edition*. New York, United States: John Wiley & Sons Inc
- Kurtiyaningsum, D., Nuraina, E., Wijaya, A.L. (2016). Pengaruh leverage, likuiditas, profitabilitas, dan umur obligasi terhadap peringkat obligasi(studi pada perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa efek Indonesia). *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 5(1): 25-40
- Lestari, K.Y., Yasa, G.W.(2014). Pengaruh penerapan corporate governance dan profitabilitas terhadap peringkat obligasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8(1): 227-249
- Moechdie H, A. dan Ramelan, H.(2012). *Gerbang Pintar Pasar Modal*. Jakarta: PT Capital Bridge Advisory
- Situmorang, B. (2017). Pengaruh peringkat obligasi, debt to equity ratio dan ukuran perusahaan terhadap yield to maturity obligasi korporasi dengan tingkat suku bunga SBI sebagai variabel moderating. *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, 3(1): 42-58.
- Surya, B.A., Nasher, T.G. (2011). Analisis pengaruh tingkat suku bunga SBI, exchange rate, ukuran perusahaan, debt to equity ratio dan bond terhadap yield obligasi korporasi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 10(2): 186-195
- Syahyunan. 2013. *Manajemen Keuangan: Perencanaan, Analisis, dan Pengendalian Keuangan*. Medan: USU Press.
- <http://www.idx.co.id/produk/surat-utang-obligasi/> diakses tanggal 6 Juli 2018
- reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/ diakses 29 Juni 2018
- databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/03/anggaran-infrastruktur-2009-2017-terus-meningkat diakses 30 Juni 2018
- katadata.co.id/infografik/2017/08/22/pembangunan-infrastruktur-masih-prioritas-jokowi. diakses 29 Juni 2018
- ekbis.sindonews.com/read/1223546/32/penerbitan-obligasi-bumn-tembus-rp261-triliun. diakses 29 Juni 2018
- pefindo.com/index.php/fileman/file/576. diakses 29 Juni 2018
- ibpa.co.id/News/ArsipBerita/tabid/126/EntryId/3499/Karakteristik-Obligasi.aspx. diakses 30 Juni 2018